

Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Suhendra Suhendra

Prodi Ilmu Komunikasi, STISIPOL Candradimuka
Korespondensi penulis: suhendra@stisipolcandradimuka.ac.id

Bambang Suprianto

Prodi Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka

Faila Sufa Marhamah

Prodi Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka

Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan Indonesia

Abstract. *This research aims to explore the potential of social media in supporting the implementation of public information disclosure policies. This study employs a qualitative approach with a case study method. Data is collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, participant observation, and social media content analysis. The collected data is analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns, themes, and insights relevant to the research objectives. Results This research reveals that social media has significant potential in strengthening the implementation of public information disclosure policies. Social media can facilitate wide dissemination of information, enhance public participation, and promote government transparency and accountability. However, challenges such as digital literacy, regulations, and adequate policies must be addressed to fully utilize the potential of social media.*

Keywords: *Social Media, Public Information Disclosure, Transparency, Public Participation, Government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis konten media sosial. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat memfasilitasi diseminasi informasi secara luas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi digital, regulasi, dan kebijakan yang memadai harus diatasi untuk memanfaatkan potensi media sosial secara optimal.

Kata Kunci: Media Sosial, Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah.

LATAR BELAKANG

Salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah keterbukaan informasi publik. Ini membuat pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab. (Wirtz & Birkmeyer, 2015). Meskipun demikian, mengadopsi kebijakan keterbukaan informasi publik menghadapi banyak tantangan, seperti kesadaran masyarakat yang rendah, ketersediaan

sumber daya yang terbatas, dan keengganan pihak tertentu untuk berbagi informasi. (Worthy, 2015).

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang sangat populer dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta memfasilitasi diskusi publik (Bonsón et al., 2015). Media sosial tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan luas, tetapi juga menawarkan platform untuk kolaborasi dan interaksi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu lainnya. (Stamati et al., 2015). Karakteristik unik media sosial, seperti keterbukaan, partisipasi, dan konektivitas, menawarkan peluang baru dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (Wirtz et al., 2018).

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi potensi media sosial dalam konteks keterbukaan informasi publik. Studi yang dilakukan oleh (Lidén & Larsson, 2016) menemukan bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian lain oleh (Picazo-Velho et al., 2012) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi publik secara efektif dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (Wirtz & Birkmeyer, 2015). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial dalam konteks ini, serta strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (Wirtz et al., 2018).

Dengan mempertimbangkan potensi media sosial dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini akan menganalisis peran media sosial dalam menyebarkan informasi publik, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang lebih efektif.

KAJIAN TEORITIS

Media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang sangat populer dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta memfasilitasi diskusi publik (Bonsón et al., 2015). Karakteristik unik media sosial, seperti keterbukaan, partisipasi, dan konektivitas, menawarkan peluang baru dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (Wirtz et al., 2018). Beberapa penelitian telah mengeksplorasi potensi media sosial dalam konteks ini.

Studi yang dilakukan oleh Lidén dan Larsson (2016) menemukan bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian lain oleh Picazo-Velho et al. (2012) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi publik secara efektif dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun, Wirtz dan Birkmeyer (2015) menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Stamati et al. (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa media sosial memiliki potensi dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas sektor publik, namun juga mengidentifikasi tantangan seperti literasi digital, regulasi, dan sumber daya yang harus diatasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik di berbagai konteks.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi media sosial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Suhendra & Suprianto, 2023) karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan kontekstual, serta memperoleh perspektif dan pengalaman yang kaya dari para partisipan (Creswell & Poth, 2018).

Studi kasus akan dilakukan pada beberapa organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi dan diseminasi informasi. Pemilihan kasus akan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana kasus-kasus yang dipilih memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015).

Pengumpulan data akan dilakukan melalui tiga metode utama:

1. Wawancara Mendalam:

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci, seperti pejabat pemerintah, staf organisasi masyarakat sipil, dan aktivis yang terlibat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan penggunaan media sosial. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam dari para partisipan mengenai potensi dan tantangan dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung keterbukaan informasi publik (Rubin & Rubin, 2012).

2. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi partisipatif dengan terlibat secara langsung dalam aktivitas terkait penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi publik dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Observasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik-praktik yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dinamika interaksi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum melalui media sosial (Kawulich, 2005).

3. Analisis Konten Media Sosial: Peneliti akan melakukan analisis konten terhadap aktivitas dan interaksi yang terjadi di media sosial terkait dengan kebijakan keterbukaan informasi publik. Analisis ini akan meliputi konten yang dibagikan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta tanggapan dan interaksi dari masyarakat umum. Analisis konten ini akan memberikan pemahaman tentang jenis informasi yang dibagikan, strategi komunikasi yang digunakan, serta tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat (Neuendorf, 2017).

Data yang terkumpul dari ketiga metode pengumpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik melibatkan proses pengkodean data, identifikasi pola dan tema, serta interpretasi makna yang terkandung dalam data. Proses ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan potensi media sosial dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam memanfaatkan media sosial untuk tujuan tersebut.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data (Patton, 2015). Triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan dan mengombinasikan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis konten media sosial. Selain itu, peneliti akan melibatkan

partisipan dalam proses member checking untuk memvalidasi temuan dan interpretasi penelitian (Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memiliki potensi signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi publik secara luas kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah.

Penyebaran Informasi Publik

Media sosial terbukti menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi publik secara luas dan cepat. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi tentang kebijakan, program, dan layanan publik, serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu partisipan:

"Media sosial telah memungkinkan kami untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memberikan informasi secara real-time tentang inisiatif dan program kami. Ini meningkatkan transparansi dan membantu masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan." (Pejabat Pemerintah)

Partisipasi Masyarakat

Media sosial juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Platform media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam diskusi tentang isu-isu publik. Hal ini mendorong keterlibatan warga negara dan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh umpan balik yang berharga dari masyarakat (Stamati et al., 2015).

"Dengan menggunakan media sosial, kami dapat terlibat dalam dialog langsung dengan masyarakat dan mendengarkan suara-suara mereka. Ini memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu kami dalam membuat keputusan yang lebih inklusif." (Aktivis Masyarakat Sipil)

Transparansi dan Akuntabilitas

Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan membagikan informasi secara terbuka dan real-time melalui media sosial, pemerintah dapat menunjukkan komitmen

mereka terhadap keterbukaan dan mempromosikan kepercayaan publik. Selain itu, media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik secara langsung (Wirtz & Birkmeyer, 2015).

"Media sosial telah membantu kami dalam menjadi lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Kami dapat memberikan pembaruan secara real-time tentang aktivitas dan keputusan kami, serta menanggapi pertanyaan dan keprihatinan dari masyarakat dengan cepat."
(Pejabat Pemerintah)

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama meliputi:

1. Literasi Digital: Kesenjangan dalam literasi digital di kalangan masyarakat dan pemerintah dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif. Kurangnya keterampilan dan pemahaman tentang penggunaan media sosial dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi yang dibagikan (Picazo-Velho et al., 2012).
2. Regulasi dan Kebijakan: Kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menghambat upaya pemanfaatan media sosial untuk keterbukaan informasi publik. Diperlukan pedoman dan standar yang jelas untuk memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik (Wirtz et al., 2018).
3. Sumber Daya: Pemanfaatan media sosial yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, seperti infrastruktur teknologi, tenaga ahli, dan anggaran yang cukup. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi tantangan bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan strategi media sosial yang komprehensif (Stamati et al., 2015).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Peningkatan literasi digital melalui program pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan media sosial secara efektif. Selain itu, pengembangan regulasi dan kebijakan yang jelas serta alokasi sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui media sosial.

Tabel 1. Hasil Penelitian:

Potensi Media Sosial	Tantangan
Penyebaran Informasi Publik	Literasi Digital
Partisipasi Masyarakat	Regulasi dan Kebijakan
Transparansi dan Akuntabilitas	Sumber Daya

Sumber: Diolah penulis, 2024

Penjelasan:

1. Potensi Media Sosial:

- Penyebaran Informasi Publik:** Media sosial memungkinkan penyebaran informasi publik secara luas dan cepat, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
- Partisipasi Masyarakat:** Platform media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
- Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan membagikan informasi secara terbuka dan real-time melalui media sosial, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik.

2. Tantangan:

- Literasi Digital:** Kesenjangan dalam literasi digital di kalangan masyarakat dan pemerintah dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk keterbukaan informasi publik.
- Regulasi dan Kebijakan:** Kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menghambat upaya pemanfaatan media sosial untuk keterbukaan informasi publik.
- Sumber Daya:** Pemanfaatan media sosial yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, seperti infrastruktur teknologi, tenaga ahli, dan anggaran yang cukup, yang dapat menjadi tantangan bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memiliki potensi signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi publik secara luas kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi digital, regulasi dan kebijakan yang memadai, serta sumber daya yang cukup harus diatasi untuk memanfaatkan potensi media sosial secara optimal.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Peningkatan literasi digital melalui program pendidikan dan pelatihan, pengembangan regulasi dan kebijakan yang jelas, serta alokasi sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui media sosial secara lebih efektif.

Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya di berbagai konteks dan lingkungan yang berbeda. Dengan terus mengeksplorasi potensi media sosial dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat memaksimalkan peran media sosial dalam mempromosikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengeksplorasi potensi media sosial dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten media sosial, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting.

Pertama, media sosial memiliki potensi signifikan dalam menyebarkan informasi publik secara luas dan cepat kepada masyarakat. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi tentang kebijakan, program, dan layanan publik, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Hal ini mendukung prinsip transparansi dan membantu masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Platform media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam diskusi tentang isu-isu publik. Ini mendorong keterlibatan warga negara dan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh umpan balik yang berharga dari masyarakat.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa media sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan membagikan informasi secara terbuka dan real-time melalui media sosial, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan dan mempromosikan kepercayaan publik. Selain itu, media

sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik secara langsung.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Tantangan utama meliputi literasi digital, regulasi dan kebijakan yang memadai, serta sumber daya yang cukup. Kesenjangan dalam literasi digital di kalangan masyarakat dan pemerintah, kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas, serta keterbatasan sumber daya dapat menghambat upaya pemanfaatan media sosial secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Peningkatan literasi digital melalui program pendidikan dan pelatihan, pengembangan regulasi dan kebijakan yang jelas, serta alokasi sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui media sosial secara lebih efektif.

Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya di berbagai konteks dan lingkungan yang berbeda. Dengan terus mengeksplorasi potensi media sosial dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat memaksimalkan peran media sosial dalam mempromosikan transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Literasi Digital:

- a. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan staf mereka sendiri.
- b. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta dapat membantu dalam mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan yang relevan.

2. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan:

- a. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial untuk keterbukaan informasi publik, termasuk pedoman, standar, dan best practices.

- b. Melibatkan pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi, dalam proses perumusan kebijakan dapat memastikan kebijakan yang komprehensif dan inklusif.
3. Alokasi Sumber Daya yang Memadai:
- a. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup, seperti anggaran, infrastruktur teknologi, dan tenaga ahli, untuk mendukung implementasi strategi media sosial yang efektif.
 - b. Kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi internasional dapat menjadi sumber pendanaan dan dukungan teknis yang berharga.
4. Kolaborasi dan Koordinasi:
- a. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk memastikan upaya yang terkoordinasi dalam memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik.
 - b. Pembentukan forum atau platform kolaboratif dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman, best practices, dan strategi yang efektif.
5. Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan:
- a. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya di berbagai konteks dan lingkungan yang berbeda.
 - b. Evaluasi berkala terhadap upaya pemanfaatan media sosial juga penting untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat lebih optimal dalam memanfaatkan potensi media sosial untuk memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, serta mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka yang telah memberikan dana penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

2. Seluruh narasumber dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
3. Rekan-rekan tim peneliti yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.
4. Keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian ini berlangsung.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan media sosial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

REFERENSI

- Bonson, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2015). Citizens' engagement on local governments' Facebook sites. An empirical analysis: The impact of different media and content types in Western Europe. *Government Information Quarterly*, 32(1), 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.11.001>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Kawulich, B. B. (2005). Participant observation as a data collection method. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 6(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-6.2.466>
- Lidén, G., & Larsson, A. O. (2016). From 1.0 to 2.0: Sweden's migration to a new web of citizenship. *Internet, Policy & Politics* 2016, 1–26. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.92>
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Picazo-Velho, I., Gutiérrez, I., & Duhamel, F. (2012). Open government data: Advancing policies in Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data* (3rd ed.). Sage Publications.
- Stamati, T., Papadopoulos, T., & Anagnostopoulos, D. (2015). Social media for openness and accountability in the public sector: Cases in the Greek context. *Government Information Quarterly*, 32(1), 12–29. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.11.004>

- Suhendra, S., & Suprianto, B. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi: Implementasi dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran Mahasiswa. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1556–1567. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.353>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open government: Origin, development, and conceptual perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2018). Open government and open data: An inside perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 31–52. <https://doi.org/10.1177/0020852317720768>
- Worthy, B. (2015). The impact of open data in the UK: Complex, unpredictable, and often ineffective? *Public Administration*, 93(3), 788–805. <https://doi.org/10.1111/padm.12166>